

## DAFTAR REFERENSI

### A. BUKU

- Chandara, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Diedit oleh S.H. Yasmon Putera. 1 ed. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Hakim, Lukman. *Buku Ajar Asas-Asas Hukum Pidana*. Diedit oleh Amira Yuda. 1 ed. Yogyakarta: deepublish, 2020.
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Cet – 1, Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. 1 ed. Bandung: CV Alfabeta, 2017.
- Lukman Santoso. *Pengantar ilmu hukum*. 1 ed. Yogyakarta: Setara Press, 2018.
- Mertha, *et al.* *Buku Ajar Hukum Pidana*. 1 ed. Denpasar: Universitas Udayana, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet - 9, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Diedit oleh Fatia Hijriyanti. Cetakan pe. Vol. 11. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Metodologi Riset Hukum*. Diedit oleh Dr. Sarjiyati, S.H. 1 ed. Madiun: Oese Pustaka, 2020.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Diedit oleh Abd. Kahar Muzakkir Faisal Rahman. 1 ed. Makasar: CV. Sosial Politic Genius, 2020.
- Rasima, *et al.* *Anti Korupsi*. Diedit oleh La Ode. 1 ed. Cilacap: Media pustaka indo, 2025.
- Rohman. *et al.*, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Devi Adry, 1 ed. Padang: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*, ed. Muhammad Jazil Rifqi, 1 ed. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- Sibarani. *et al*, *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: PT Actual Potensia Mandiri, 2019.

Sofyan, andi. Buku Ajar Hukum Pidana, 1 ed. Makasar: Penerbit Pustaka Pena Press, 2016.

Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*, Winengku Nugroho, 1 ed. Jakarta: Penerbit Kepel Press, 2019

Sudaryono, dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Diedit oleh Kuswandani, SH. 1 ed. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Supardi. *Pendidikan AntiKorupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Diedit oleh Eva Septiana. Cet 1. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2024.

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Diedit oleh Putri Kusuma Anggraini. 1 ed. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

United Nations Development Programme. *Sextortion: Memahami Dan Menanggulangi Pemerasan Seksual Dalam Pelayanan Publik Di Indonesia*. 2022.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, ed. M Rizqi Azmi, 1 ed. Tangerang: PT NUsantara Persada Utama, 2017.

Wekke, Ismail Suardi. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, Gawe Buku. Yogyakarta: Cv. Adi Karya Mandiri, 2019.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Diedit oleh Muhammad Tajuddin. 1 ed. yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

## **B. ARTIKEL ILMIAH**

Andi Rachmat Indra et al., “Gratifikasi Seksual sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi : Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Prinsip Hukum Islam,” *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik dan Pemerintahan* 3, (2026): 118–130. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v3i1.1545>.

Arsjad, Mardiana. “Gratifikasi Pelayanan Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi.” *Universitas Borneo Tarakan* 3 (2020): 1–26. <https://doi.org/10.35334/ay.v3i1.988>.

Asyari, Muhammad Izul Haqiqi. “Analisis Yuridis Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/78664/1/11200454000016\\_muhammad\\_izzul\\_haqqi\\_asyari.Pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/78664/1/11200454000016_muhammad_izzul_haqqi_asyari.Pdf).

Darto et al., “Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan

pengidap gangguan kejiwaan dalam prespektif hukum pidana” *Jural Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol 1, no. 2 (2023): 257–264. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.128>.

Dary, Muhammad Alvito. “Pengaturan Hukum Mengenai Gratifikasi Pelayanan Seksual Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi.” *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2024): 161–172. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.151>.

Fardil, La Niasa, Fatmawati L. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi (Suatu Studi di Polda Sultra).” *Sultra Law Review* 04, no. 1 (2022): 2029–2045. <https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev>.

Halipah, Gisni, Aji Manggala Tirta, Muhammad Rizky Juniasyah, dan Muhamad Naza Surya. “Dinamika Korupsi dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia : Kajian Hukum dan Sosial” *Jurnal Serambi Hukum*, Vol 15, no. 02 (2022): 102–108. <https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.948>.

Handrawan, Deity Yuningsih, dan Ahmad Firman Tarta. “Kebijakan Formulasi Gratifikasi Seksual terhadap Penyelenggara Negara.” *Lakidende Law Review* 1, no. 1 (2022): 1-14. <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i1.1>.

Harefa, Beniharmoni, dan Nurul Bazroh. “Pembuktian Gratifikasi Seksual dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 03, no. 02 (2022): 44–52. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.83>.

Hasibuan, Fardiansyah. “Sanksi Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang Tipikor dan Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 96–108. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v2i1.9080>.

Iqbal, Muhammad. “Tinjauan yuridis alat bukti dalam tindak pidana korupsi.” *Kodifikasi*, vol 2, no. 2 (2020): 1–8. <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/Kodifikasi/article/view/941/636>.

Kresna, Erlita. “Pelayanan Seksual sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik.” *Deviance: Jurnal Kriminologi* 6, no. 1 (2022): 66–85. <https://doi.org/10.36080/djk.v6i1.1815>.

Miru, Grazia Vione, Salmon Eliazer, Marthen Nirahua, dan Hadiba Zachra Wadjo. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa.” *Pattimura Legal Journal* 2, no. 2 (2023): 74–107. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i2.8602>.

Prihastuti, Hesti. “Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Skripsi.” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023.

Putra, Nandha Risky, dan Rosa Linda. “Korupsi di Indonesia : Tantangan perubahan sosial.” *Integritas jurnal antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 13–24. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>.

Sepanya Situmorang, “Pembuktian Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *law research review quarterly* 11, no. 2 (2025): 482–504. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v11i2.28192>.

Sofhian, Subhan. “Causes And Corruption Prevention : Indonesia Case Penyebab Dan Pencegahan Korupsi : Kasus Indonesia.” *Tatar Pasundan Jurnal Diklat Keagamaan XIV*, no. 1 (2020): 65–76. <https://doi.org/10.38075/tp.v14i1.84>.

Suryani, Ade Irma, dan Achmad Hasan Basri. "Rekonstruksi Frasa Fasilitas Lainnya Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi Seksual." *Panitera: Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 108-123. <https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/6>.

Wijanarko, Dwi Seno. “Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Perluasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif di Indonesia.” *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi* 1, no. 1 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.31599/svhmc459>.

### **C. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

#### D. INTERNET

Detiknews, Senin, 27 Mei 2013, Mahfud Md: Banyak Keputusan Pejabat Negeri Ini Dikendalikan Wanita Nakal, <https://news.detik.com/berita/d-2256377/mahfud-md-banyak-keputusan-pejabat-negeri-ini-dikendalikan-wanita-nakal> , Diakses Pada 19 November 2025. Pukul 14:20. WIB.

KBBI, <https://KBBI.web.id/korupsi> Diakses Pada 20 November 2025, Pukul 18:02 WIB.

*Law Insider Dictionary*, <https://www.lawinsider.com/dictionary/sexual-services> Diakses Pada 19 November 2025. Pukul 04:17 WIB.

*Merriam-Webster.Dictionary*, <https://www.merriamwebster.com/dictionary/corrupt> Diakses Pada 20 November 2025. Pukul 17: 55 WIB.

Neni Puji Artanti, Selasa, 15 Juni 2021, Meningkatkan Kesadaran Untuk Berperilaku Anti Koruptif Berlandaskan Sembilan Nilai Anti Korupsi, <https://share.google/9piz9clcsfninjwt> Diakses Pada 17 November 2025, Pukul 21:08 WIB.

Portal Hukum. 21 Januari 2025. Masalah Pokok Dalam Hukum Pidana. <https://portalhukum.id/belajar-hukum/masalah-pokok-dalam-hukum-pidana/> Diakses pada 14 April 2026. Pukul 05.41 WIB.

Shafira Nadya Nathasya, 30 Oktober 2024, Gratifikasi Seksual: Ketika Gratifikasi Tak Hanya Materi, Alchemist Group [https://share.google/xmhebbmv\\_rmtlikadi](https://share.google/xmhebbmv_rmtlikadi) Diakses Pada 19 November 2025. Pukul 08:53 WIB.

*Transparency International*. (2020 - 2024). *Corruption Perceptions Index*. *Transparency International*. <https://www.transparency.org/cpi> Diakses pada 18 November 2025. Pukul 12.15 WIB.